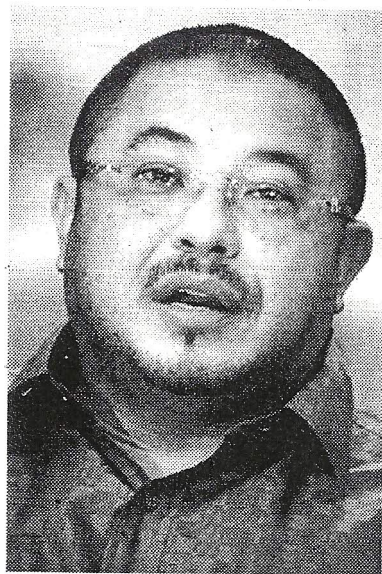


Elite PKS Prihatin Pemerintah Tak Mau Definisiin Terorisme

RM - 21/04/18



Aboe Bakar Al Habsyi

KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak menginginkan adanya definisi dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sikap tersebut dipertahankan sejak dari awal pembahasan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Perlu ada gagasan baru untuk membenahi kekacauan polemik isu terorisme. Karena terorisme tidak bisa dilihat sebagai sebuah kejahatan murni saja, tetapi juga berimplikasi dan lahir dari masalah lainnya seperti korupsi yang kian merajalela, kesenjangan sosial dan

pertumbuhan ekonomi yang stagnan,” katanya, kemarin.

Aboe bilang, para penyelenggaraan negara semestinya menyadari penyebab karut marut persoalan terorisme. Salah satunya, sebut dia, karena penafsiran tentang definisi terorisme yang tidak jelas. Dia mengingatkan, aturan pemberantasan terorisme yang pemerintah buat selama ini telah berdampak buruk karena telah menjerat umat muslim yang tak bersalah.

“Dari 61 negara yang memiliki concern terkait persoalan terorisme, hanya 16 negara yang tidak mempunyai definisi spesifik terorisme dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dia mengingatkan, absennya definisi ‘terorisme’ yang universal dan komprehensif tidak meninggalkan negara-negara bertanggung jawab untuk merumuskan definisinya sendiri sesuai dengan kebutuhan politik dan situasi keamanan negaranya tersebut.

“Kekacauan baru akan muncul apabila tidak ada definisi terorisme dalam undang-undang. Pemerintah harusnya membuat definisi yang jelas agar pemberantasan terorisme ke depan tidak dicurigai bermotif menyudutkan kelompok tertentu,” pungkasnya. ■ HEN